



KBPR. SENDANG HARTA SEJAHTERA

# LAPORAN

# 2021

PENERAPAN  
TATA KELOLA

🏠 Jl. A. Yani Ds. Pekukuhan RT/RW 005/003 Mojosari-Mojokerto,  
Mojokerto  
☎ 0321-591515  
📠 0321-592621



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



BANK  
PERKREDITAN  
RAKYAT



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola yg menerapkan prinsip2 keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dlm melaksanakan aktivitas usahanya.

Struktur Tata Kelola KBPR. Sendang Harta Sejahtera telah merujuk pada Peraturan OJK ttg Penerapan Tata kelola bagi BPR. Berdasarkan Laporan publikasi KBPR. Sendang Harta Sejahtera posisi 31-12-2021 dpt diinformasikan bhw Total Asset BPR adalah sebesar Rp.21.437.387.887, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.4.980.701.000. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di KBPR. Sendang Harta Sejahtera selanjutnya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, KBPR. Sendang Harta Sejahtera mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Persereoran Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang



Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR

- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) KBPR. Sendang Harta Sejahtera beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Mendorong & mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya BPR & pengelolaan risiko scr lebih efektif shg dpt meningkatkan nilai BPR.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KBPR. SENDANG HARTA SEJAHTERA**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat & dpt diperbandingkan serta dpt diakses oleh pihak yg berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas & tanggung jawab yg jelas bagi masing2 organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai BPR, sasaran usaha & strategi BPR.

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif & bebas dari tekanan pihak manapun

#### **5 Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan & kewajaran

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

KBPR. Sendang Harta Sejahtera berkomitmen senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dgn standar Tata Kelola yg telah ditetapkan oleh OJK, sehingga dpt meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yg Baik & memiliki daya saing tinggi



## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: PULIH WAHYU DIYONO, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</li> <li>2. Mengelola BPR sesuai kewenangan &amp; tanggung jawab sebagaimana diatur dlm Anggaran Dasar &amp; peraturan Perundang undangan.</li> <li>3. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kpd pemegang saham dlm RAT.</li> <li>4. Mengungkapkan kebijakan BPR yg bersifat strategis di bidang kepegawaian.</li> <li>5. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.</li> </ol>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: ATIK WIDYAWATI,SE
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>2. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja aatau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aaudit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK.</li> <li>3. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris</li> </ol>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas</p> <p>Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional</p> <p>Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat</p> <p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem</p>		



Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	<p>Nama : H. HERI SUSANTO,SP.MM</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.</li> <li>3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR</li> <li>4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR</li> <li>b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam pengaturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>5. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab thd pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lainnya.</li> <li>6. Memberitahukan kepada OJK :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan</li> <li>b. keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR</li> </ol> </li> </ol>
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>		
<p>Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis</p> <p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas</p> <p>Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional</p> <p>Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang</p> <p>Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem</p> <p>Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem</p>		



Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -



## B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	PULIH WAHYU DIYONO, SE	25.000.000	0,20%
2	ATIK WIDYAWATI,SE	-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	PULIH WAHYU DIYONO, SE	601696	PT BPR HARTA SWADIRI	-
2	PULIH WAHYU DIYONO, SE	600813	PT BPR DANAPUTRA SAKTI	-
3	ATIK WIDYAWATI,SE	601696	PT BPR HARTA SWADIRI	-
4	ATIK WIDYAWATI,SE	600813	PT BPR DANAPUTRA SAKTI	-

## C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PULIH WAHYU DIYONO, SE	tidak ada	H. HERI SUSANTO,SP.MM- Hubungan pinjaman/kredit	tidak ada
2	ATIK WIDYAWATI,SE	tidak ada	H. HERI SUSANTO,SP.MM- Hubungan pinjaman/kredit	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PULIH WAHYU DIYONO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ATIK WIDYAWATI,SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada



#### D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	50.000.000	0,76%

##### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	601696	PT BPR HARTA SWADIRI	-
2	H. HERI SUSANTO,SP.MM	600813	PT BPR DANAPUTRA SAKTI	-

#### E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	tidak ada	tidak ada	H. Suprpto- Hubungan pinjaman/kredit

##### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada

#### F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

##### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	284.000.000	1	128.000.000
2	Tunjangan	2	90.400.000	1	17.000.000
3	Tantiem	2	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	1	0
Total			374.400.000		145.000.000



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	1 Unit perumahan bagi Direksi yang beralamat dari luar kota Mojokerto	-
2	Transportasi	1 Unit Mobil Xenia tahun 2017 1 Unit Mobil Avanza tahun 2014	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS TK dan BPJS Kes	BPJS TK dan BPJS Kes
4	Fasilitas lainnya	Listrik Telepon/Pulsa	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,92	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,40	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,07	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,33	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,39	1



## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-1-12	3	- Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan OJK yang harus dipenuhi pada akhir tahun 2020. - Evaluasi pencapaian terhadap target dari Rencana Kerja tahun 2021 - Menyetujui pengajuan dari Direksi untuk melakukan Hapus Buku Kredit Kolektibilitas macet pada akhir tahun 2020 - Membahas tentang pelaksanaan kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus bagi Kredit yang terdampak. -
2	2021-4-5	2	- Evaluasi terhadap persiapan untukantisipasi penarikan Dana masyarakat menjelang hari Raya - Mempertimbangkan pemberian perpanjangan stimulus tahap II sesuai dengan POJK No. 48 tahun 2020 - Menyetujui untuk melakukan pencarian Dana Pihak ketiga, dengan perhimpunan Dana dari ABP dan dengan melakukan pinjaman pada Bank Lain
3	2021-6-3	2	- Dengan Kondisi perekonomian masyarakat yang masih mengalami pemulihan dari pandemi COVID-19 , perlu diperhatikan dan pengkajian lagi terhadap nasabah yang terdampak, mengingat POJK merupakan kebijakan yang sangat mungkin diberhentikan, sehingga KBPR Sendang Harta Sejahtera perlu mengantisipasi hal tsb. - Evaluasi terhadap pencapaian penyaluran kredit yang sudah bisa mencapai target dari RBB , hendaknya perlu dijaga mengingat masih perlu waktu sampai akhir tahun untuk diharapkan selalu melakukan pertumbuhan kredit yang sehat agar bisa menurunkan kolektibilitas dan capaian NPL yang sehat.
4	2021-10-4	2	- Melanjutkan Proses Perubahan Nama sebagai rencana tindak lanjut proses perubahan badan Hukum BPR - Menginventarisir kredit stimulan yang Jatuh Tempo, meskipun ada perpanjangan regulasi, dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat yang mulai ada pertumbuhan yang lebih baik serta memberi solusi bagi nasabah yang masih terdampak ekonomi sebelum masuk kolektibilitas.

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	4	0	100,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



**J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-12-09	Sosial	Memberikan santunan baik berupa barang yang dibutuhkan Korban Bencana Alam Meletusnya Gunung Semeru	Perbarindo Mojokerto Jombang	250.000

**M. PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola KBPR. Sendang Harta Sejahtera ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di KBPR. Sendang Harta Sejahtera. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola KBPR. Sendang Harta Sejahtera ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di KBPR. Sendang Harta Sejahtera, Terima Kasih.

Mojokerto, 25 April 2022  
Persetujuan Pengurus KBPR. Sendang Harta Sejahtera

  
**H. HERI SUSANTO, SP.MM**  
Komisaris Utama

  
**PULIH WAHYU DIYONO, SE**  
Direktur Utama